

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Ketidapatuhan, Keterlambatan, dan Pemanipulasian Wajib Pajak Pada Kantor Desa Buntaran Bagian Pelayanan Pajak” ini ditulis oleh M. Khozinatul Asror, NIM. 12403173193, Jurusan Akuntansi Syari’ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Tulungagung, Pembimbing Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A.

Pajak adalah suatu kewajiban yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat. Meskipun juga secara normatif Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan hukum bagi wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi kewajibannya, namun dalam kenyataannya Pemerintah belum secara optimal melakukan penegakan hukum kepada wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya berupa pengenaan sanksi kepada wajib Pajak tersebut. Salah satu faktor yang menjadikan kendala bagi Pemerintah dalam penerapan sanksi di bidang hukum Pajak adalah belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat sebagai wajib Pajak mengenai pentingnya membayar Pajak dan sanksi yang akan diterima apabila wajib Pajak melalaikan kewajibannya.

Metode dan jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang mengumpulkan dan menganalisis data yang berupa kata-kata baik itu lisan maupun tulisan serta perbuatan-perbuatan manusia. Penelitian ini tidak berusaha menghitung data yang telah diperoleh dengan statistik. Kemudian menyajikannya dengan bentuk narasi sebagai keterangan dan menyimpulkan hasil dari penelitian yang terkait dengan penerapan sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan terhadap ketidapatuhan, keterlambatan, dan pemanipulasian wajib pajak pada kantor desa Buntaran bagian pelayanan pajak.

Dari hasil penelitian, (1) Pembayaran pajak saat ini tidak hanya melalui offline, pemerintah sudah memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak dapat dilaksanakan online melalui: Fasilitas perbankan, e-commerce, situs resmi BPKPD, (2) Sanksi administrasi pajak bagi yang terlambat, memanipulasi dan tidak patuh adalah dengan membayar denda sebesar 2% perbulan, sebagaimana yang tercantum dalam UU No 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, (3) Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi yaitu kurangnya kesadaran individu untuk membayar pajak, faktor ekonomi dan tidak adanya pendapatan harian, serta kenaikan pajak menjadi alasan tertentu bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran yaitu terlambat, memanipulasi ataupun tidak mematuhi aturan.

Kata kunci : Sanksi Administrasi, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

Thesis with the title "Implementation of Land and Building Tax Administration Sanctions Against Non-compliance, Delay, and Manipulation of Taxpayers at the Buntaran Village Office, Tax Service Section" was written by M. Khozinatul Asror, Student Registered Number 12403173193, Sharia Accounting Department, Faculty of Islamic Economics and Business, Tulungagung State Islamic University, Advisor Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A.

Tax is an obligation that has been issued by the government to the community. Even though normatively the Government has issued legal provisions for taxpayers who do not fulfill their obligations or are late in fulfilling their obligations, in reality the Government has not optimally enforced the law on taxpayers who do not fulfill their obligations in the form of imposing sanctions on the taxpayer. One of the factors that make it difficult for the Government to implement sanctions in the field of tax law is that there is not yet optimal socialization to the public as taxpayers regarding the importance of paying taxes and the sanctions that will be received if taxpayers neglect their obligations.

The method and type of research used is a qualitative approach method. Qualitative methods are research that collects and analyzes data in the form of words, both spoken and written, as well as human actions. This study did not attempt to calculate the data that has been obtained with statistics. Then present it in narrative form as a description and conclude the results of research related to the application of land and building tax administration sanctions against non-compliance, delays, and manipulation of taxpayers at the Buntaran village office in the tax service section.

The results of the study (1) Current tax payments are not only done offline, the government has made it easier for taxpayers to pay taxes online through: banking facilities, e-commerce, the BPKPD official website, (2) tax administration sanctions for latecomers, manipulating and disobeying is by paying a fine of 2% per month, as stated in Law No. 12 of 1994 concerning land and building taxes, (3) Obstacles faced in the application of sanctions are the lack of awareness of individuals to pay taxes, economic factors and lack of income daily activities, as well as tax increases become certain reasons for taxpayers who commit violations, namely being late, manipulating or not complying with the rules.

Keywords: Administrative Sanctions, Land and Building Tax